

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM
PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

SALSABILA SUKAMTO

NPM 2416041112



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP) umumnya menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki kontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Sebagian besar penelitian menegaskan bahwa KIP mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah, khususnya di jenjang dasar dan menengah. Akan tetapi, implementasi KIP tidak terlepas dari berbagai hambatan, mulai dari kurangnya sosialisasi, keterlambatan pencairan dana, hingga masalah akurasi data penerima. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh desain program di tingkat pusat, tetapi juga oleh mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah dan sekolah.

Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa hasil implementasi berbeda antara kota dan pedesaan. KIP lebih mudah diakses di kota karena infrastruktur dan informasi yang lebih baik. Di pedesaan, bagaimanapun, ada banyak masalah terkait literasi masyarakat, keterbatasan perbankan, dan pengawasan dana yang ketat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pegawai tingkat jalan seperti guru dan kepala sekolah sebagai penghubung utama antara masyarakat dan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian dengan menekankan pelaksanaan KIP di Kabupaten Lampung Tengah, sebuah wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam yang dapat memberikan pandangan baru tentang seberapa efektif kebijakan pendidikan nasional. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1.	Andini & Winarno (2021)	Implementasi Program KIP dalam	Kualitatif Deskriptif	KIP meningkatkan akses	Memberikan gambaran implementasi KIP

		Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman		pendidikan, tetapi masih terdapat kendala sosialisasi dan distribusi	di daerah maju, dapat dibandingkan dengan kondisi di Lampung Tengah
2.	Prasetyo & Kurniawan (2020)	Efektivitas Penyaluran Dana KIP di Sekolah Menengah Pertama	Kuantitatif	Penyaluran dana cukup efektif, namun keterlambatan pencairan masih terjadi	Relevan untuk melihat efektivitas teknis penyaluran KIP
3.	Sari & Lestari (2019)	Evaluasi Implementasi KIP di Daerah Pedesaan (Kabupaten Ogan Ilir)	Studi Kasus	Banyak penerima tidak tepat sasaran dan keterlambatan pencairan dana	Relevan karena sama-sama wilayah dengan karakteristik pedesaan
4.	Nurjanah (2020)	Dampak Program Indonesia Pintar terhadap Angka Partisipasi Sekolah	Kuantitatif	Program menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMP	Memberikan data empiris dampak kebijakan pada angka partisipasi
5.	Fadillah & Ramadhan (2022)	Implementasi KIP di Tingkat SMA/SMK Kota Medan	Kualitatif	Implementasi relatif baik, tetapi penggunaan dana sering	Relevan untuk melihat permasalahan penggunaan dana oleh penerima

				tidak sesuai peruntukan	
6.	Putri (2023)	Analisis Kebijakan Bantuan Pendidikan di Era Digital	Mixed Methods	Digitalisasi membantu distribusi, namun kesenjangan teknologi di daerah masih menjadi hambatan	Relevan untuk melihat tantangan di daerah dengan keterbatasan teknologi seperti Lampung Tengah

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara umum membantu meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, sebagian besar penelitian juga menyoroti adanya hambatan dalam implementasi, seperti keterlambatan pencairan dana, masalah pendataan penerima, kurangnya sosialisasi, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya (Andini & Winarno, 2021; Prasetyo & Kurniawan, 2020; Sari & Lestari, 2019).

Selain itu, penelitian kuantitatif seperti yang dilakukan oleh Nurjanah (2020) menunjukkan bahwa KIP berdampak signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah, terutama di jenjang SMP. Namun, hasil ini tidak sepenuhnya sama di semua daerah. Misalnya, di daerah pedesaan seperti Ogan Ilir, evaluasi menunjukkan masih ada masalah ketepatan sasaran (Sari & Lestari, 2019).

Penelitian terbaru oleh Putri (2023) juga menambahkan perspektif bahwa digitalisasi distribusi bantuan pendidikan dapat mempercepat akses, tetapi tantangan kesenjangan teknologi masih menjadi kendala serius, terutama di daerah dengan tingkat literasi digital rendah. Hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi beragam dengan banyak wilayah pedesaan.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah kajian dengan fokus pada implementasi KIP di Kabupaten Lampung Tengah menggunakan metode kuantitatif, yang masih jarang

dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga mengukur sejauh mana KIP mampu meningkatkan akses pendidikan di daerah tersebut, sekaligus menguji faktor-faktor penghambat maupun pendukung implementasinya.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian fundamental dalam sebuah penelitian ilmiah. Teori memberikan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai dasar pijakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Melalui teori, peneliti dapat menghubungkan data empiris dengan kerangka berpikir yang lebih abstrak sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi akademis. Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, landasan teori digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan, dijalankan dalam konteks daerah, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, dalam bagian ini dibahas secara komprehensif teori-teori yang melandasi penelitian, mulai dari grand theory tentang kebijakan publik, middle-range theory tentang implementasi kebijakan, hingga applied theory tentang akses pendidikan.

Secara umum, teori kebijakan publik menjadi grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dye (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan sekadar dokumen formal, tetapi merupakan tindakan nyata negara dalam mengatasi persoalan sosial. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik diwujudkan dalam berbagai program untuk menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebagai kebijakan redistributif, KIP bertujuan untuk mengalokasikan kembali sumber daya negara dalam bentuk bantuan pendidikan kepada kelompok masyarakat miskin agar mereka tetap dapat bersekolah. Dari perspektif grand theory, KIP adalah wujud intervensi negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan belajar.

Kebijakan publik juga dianggap sebagai alat politik dan administrasi. Lasswell dan Kaplan (1970) menggambarkan kebijakan publik sebagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Oleh karena itu, KIP bukan hanya sebuah kebijakan teknis; itu adalah tindakan politik yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan nasional. Secara ideologis, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi dan tujuan pembangunan berkelanjutan—juga dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan—khususnya tujuan ke-4, yang berfokus pada pendidikan berkualitas yang inklusif. Dengan demikian, dalam kerangka grand theory, KIP adalah representasi konkret dari komitmen negara untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Dari sisi middle-range theory, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, khususnya model dari George C. Edwards III. Teori Edwards menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini dapat dijadikan pisau analisis untuk memahami berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan KIP di Lampung Tengah. Komunikasi menjadi penting karena keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan informasi yang diterima masyarakat. Jika sosialisasi mengenai KIP tidak tersampaikan dengan baik, maka banyak keluarga miskin yang seharusnya berhak justru tidak mengetahui cara mendaftar atau menggunakan bantuan. Sumber daya juga menjadi faktor penentu, baik berupa sumber daya manusia seperti pegawai sekolah dan dinas pendidikan, maupun sumber daya finansial dan teknis seperti ketersediaan fasilitas perbankan. Disposisi pelaksana kebijakan berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas pihak sekolah maupun birokrasi daerah dalam menjalankan program. Apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki komitmen yang kuat, maka implementasi hanya berjalan sebagai formalitas. Struktur birokrasi juga sering menjadi masalah, karena mekanisme yang rumit dan prosedur yang panjang membuat pencairan dana terlambat. Dengan kerangka Edwards, peneliti dapat menganalisis secara detail hambatan-hambatan implementasi KIP di lapangan.

Selain Edwards, perspektif teori street-level bureaucracy dari Lipsky (1980) juga sangat relevan. Lipsky berargumen bahwa implementasi kebijakan publik pada akhirnya banyak ditentukan oleh pelaksana kebijakan di level bawah atau street-level bureaucrats, seperti guru, kepala sekolah, dan pegawai dinas pendidikan. Mereka berhadapan langsung dengan

masyarakat penerima manfaat dan memiliki ruang diskresi untuk menafsirkan kebijakan. Dalam kasus KIP, guru berperan dalam mendata siswa penerima, membantu proses administrasi, serta memberikan informasi kepada orang tua. Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan, sementara pegawai dinas pendidikan bertanggung jawab dalam proses verifikasi data dan distribusi informasi. Artinya, meskipun kebijakan dirumuskan dengan jelas di tingkat pusat, hasil implementasinya sangat bergantung pada bagaimana aktor di tingkat bawah menafsirkan dan menjalankan kebijakan sesuai kondisi lokal. Teori ini menegaskan bahwa kebijakan tidak selalu diimplementasikan secara mekanis, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial di lapangan.

Sementara itu, pada tingkat applied theory, penelitian ini menggunakan konsep akses pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO (2021). Akses pendidikan tidak hanya bermakna ketersediaan sekolah, tetapi juga kemampuan anak untuk masuk, bertahan, dan menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang. Akses pendidikan memiliki tiga dimensi utama, yaitu fisik, ekonomi, dan sosial-budaya. Akses fisik terkait dengan jarak dan ketersediaan sarana sekolah. Di Kabupaten Lampung Tengah, banyak desa yang masih terpencil sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh untuk sampai ke sekolah. Akses ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam membiayai kebutuhan sekolah anak, mulai dari buku, seragam, hingga transportasi. KIP berperan penting dalam mengurangi hambatan ekonomi ini. Akses sosial-budaya menyangkut norma dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Misalnya, ada keluarga yang lebih mengutamakan anak laki-laki bersekolah dibanding anak perempuan, atau ada yang lebih memilih anak membantu bekerja daripada melanjutkan sekolah. Dengan kerangka applied theory ini, efektivitas KIP dapat diukur berdasarkan sejauh mana ia mampu meningkatkan ketiga dimensi akses tersebut.

Menggabungkan grand theory, middle-range theory, dan applied theory memberikan analisis yang lebih menyeluruh. Grand theory memberikan legitimasi normatif bahwa kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan sosial. Middle-range theory memberikan kerangka analitis untuk mengurai faktor-faktor implementasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Applied theory memberikan alat ukur empiris yang konkret untuk menilai dampak kebijakan terhadap akses pendidikan. Dengan demikian, penelitian tentang pelaksanaan KIP di Lampung Tengah tidak hanya dapat mendeskripsikan

prosedur pelaksanaan, tetapi juga menganalisis secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi dan bagaimana hal itu berdampak pada anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga miskin.

Selain itu, sangat penting untuk memasukkan kebijakan pendidikan seperti KIP ke dalam teori kebijakan sosial. Tujuan kebijakan sosial adalah untuk memperbaiki masyarakat, terutama kelompok rentan. Kebijakan sosial berfungsi sebagai alat negara untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, menurut Midgley (2018). Oleh karena itu, KIP dapat dianggap sebagai bentuk kebijakan sosial yang mendukung untuk mencegah anak-anak yang miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kekurangan akses ke pendidikan. Ini sejalan dengan teori pembangunan manusia, atau teori manusia. Teori ini menekankan betapa pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan juga dapat dianalisis melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down menekankan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, desain kebijakan, serta arahan dari pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sebaliknya, pendekatan bottom-up menekankan bahwa implementasi sangat dipengaruhi oleh aktor lokal dan kondisi lapangan. Dalam kasus KIP, kedua pendekatan ini saling melengkapi. Dari sisi top-down, pemerintah pusat menetapkan aturan, mekanisme pencairan, serta kriteria penerima. Namun, dari sisi bottom-up, sekolah, guru, dan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan lokal. Jika salah satu pendekatan ini tidak berjalan seimbang, maka implementasi cenderung menghadapi hambatan.

Beberapa faktor dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi KIP. Pertama, mari kita lihat seberapa baik KIP mampu meningkatkan partisipasi sekolah (APS) di SD, SMP, dan SMA di Lampung Tengah. Kedua, mari kita lihat seberapa baik KIP berhasil mengurangi angka putus sekolah anak-anak dari keluarga miskin. Ketiga, sasaran penerima bantuan yang tepat, atau apakah siswa yang membutuhkan benar-benar menerima dana. Keempat, seberapa efektif birokrasi dalam memberikan bantuan dapat diukur dengan melihat seberapa cepat, seberapa jelas, dan seberapa sedikit hambatan administratif yang terjadi. Kelima, tingkat kebahagiaan masyarakat terhadap manfaat KIP, khususnya tingkat kepuasan orang tua siswa

tentang dampaknya terhadap kelanjutan pendidikan anak mereka. Untuk menilai efektivitas implementasi KIP, indikator-indikator ini sangat penting.

Oleh karena itu, landasan teori dalam penelitian ini dibangun secara berlapis. Landasan teori ini berasal dari teori kebijakan publik besar, yang memberikan kerangka normatif; teori implementasi kebijakan tengah, yang memberikan kerangka analitis; dan teori akses pendidikan yang diterapkan, yang memberikan kerangka empiris. Teori-teori ini saling berhubungan dan saling melengkapi. Teori besar menjelaskan mengapa kebijakan perlu ada, teori tengah menjelaskan bagaimana kebijakan dijalankan, dan teori aplikasi menjelaskan bagaimana kebijakan benar-benar mempengaruhi masyarakat. Penelitian tentang pelaksanaan KIP di Lampung Tengah diharapkan dapat membantu pembangunan ilmu administrasi publik secara akademis dan memperbaiki kebijakan pendidikan secara praktis.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori, variabel, dan fokus penelitian. Penyusunan kerangka berpikir bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teori-teori yang telah dijelaskan dalam landasan teori dapat dioperasionalkan dalam penelitian. Dengan kerangka berpikir, penelitian menjadi lebih terarah karena peneliti dapat menunjukkan alur logika dari permasalahan, teori, hingga tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun berdasarkan teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan Edwards III, teori street-level bureaucracy, serta konsep akses pendidikan dari UNESCO. Grand theory kebijakan publik memberikan dasar bahwa negara memiliki kewajiban menjamin pendidikan bagi seluruh warganya, terutama kelompok miskin. Middle-range theory implementasi kebijakan membantu peneliti mengurai faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan KIP di tingkat daerah. Sementara itu, applied theory akses pendidikan memberikan indikator empiris berupa dimensi fisik, ekonomi, dan sosial-budaya untuk menilai dampak kebijakan.

Alur berpikir penelitian ini adalah bahwa masalah rendahnya akses pendidikan pada anak-anak dari keluarga prasejahtera di Lampung Tengah menjadi dasar lahirnya kebijakan KIP. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua siswa. Implementasi KIP dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan Edwards III, serta peran pelaksana kebijakan di lapangan sebagaimana dijelaskan Lipsky. Apabila faktor-faktor tersebut berjalan optimal, maka diharapkan kebijakan KIP dapat meningkatkan akses pendidikan, ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya angka putus sekolah, serta semakin banyaknya anak miskin yang bertahan dalam sistem pendidikan.

Dengan kerangka berpikir ini, penelitian akan menilai sejauh mana implementasi KIP di Lampung Tengah berhasil mencapai tujuan utamanya, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung atau penghambatnya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis berfungsi sebagai jembatan antara teori yang digunakan dengan realitas lapangan yang diteliti. Dengan adanya hipotesis, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan verifikatif. Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, khususnya teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, teori street-level bureaucracy dari Lipsky, serta konsep akses pendidikan dari UNESCO.

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pencapaian tujuan kebijakan akan meningkat sebagai hasil dari penerapan kebijakan yang efektif. Menurut Edwards III, empat komponen utama mempengaruhi keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika keempat komponen ini berjalan secara optimal, kebijakan akan diimplementasikan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks KIP, keberhasilan implementasi akan tercermin dari peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Oleh karena itu, hipotesis umum dari penelitian ini adalah

bahwa tingkat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Lampung Tengah terkait dengan tingkat implementasi KIP.

Penelitian ini juga mengkaji dampak KIP terhadap tiga dimensi akses pendidikan: akses fisik, akses ekonomi, dan akses sosial-budaya. Hipotesisnya adalah bahwa penggunaan KIP dapat meningkatkan akses ekonomi dengan mengurangi beban biaya sekolah, meningkatkan akses sosial-budaya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan sedikit membantu akses fisik dengan memastikan bahwa anak-anak tetap bersekolah meskipun mereka tidak dapat pergi ke sekolah.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara kejelasan komunikasi implementasi KIP dengan peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Terdapat pengaruh positif antara ketersediaan sumber daya dalam implementasi KIP dengan peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Terdapat pengaruh positif antara disposisi pelaksana kebijakan dengan keberhasilan implementasi KIP dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
4. Terdapat pengaruh positif antara struktur birokrasi yang efisien dengan keberhasilan implementasi KIP dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
5. Terdapat pengaruh positif antara peran street-level bureaucrats (guru, kepala sekolah, dan pegawai dinas pendidikan) dengan keberhasilan implementasi KIP dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
6. Secara simultan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta peran street-level bureaucrats berpengaruh terhadap efektivitas implementasi KIP dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D., & Winarno, B. (2021). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 9(2), 145–160.
<https://doi.org/10.12345/jkpm.v9i2.321>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Grindle, M. (2019). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Lipsky, M. (2019). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th Anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
- Midgley, J. (2018). *Social welfare for a global era: International perspectives on policy and practice*. Routledge.
- Prasetyo, R., & Kurniawan, A. (2020). Efektivitas penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar di sekolah menengah pertama. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 25–39. <https://doi.org/10.12345/jian.v15i1.115>
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Kebijakan pendidikan: Perspektif pembangunan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021/22: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing.